

**PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KOLONIAL BELANDA DI JAWA:
SEBUAH TINJAUAN LITERATUR
(DEVELOPMENT OF DUTCH COLONIAL SETTLEMENTS IN JAVA : A LITERATURE REVIEW)**

Dimas Wihardyanto^{1*}, Ikaputra²
Universitas Gadjah Mada^{1,2}
e-mail: *¹dimas@ugm.ac.id, ²ikaputra@ugm.ac.id

Abstrak Kota-kota di Indonesia yang tumbuh dan berkembang pada masa pendudukan Belanda memiliki pola permukiman yang khas yaitu memiliki pembagian wilayah permukiman berdasar penggolongan etnis. Warga Belanda dan kaum kulit putih sebagai warga kelas satu mendapatkan prioritas untuk menikmati kawasan permukiman yang tertata dan memiliki infrastruktur yang relatif lengkap untuk jamannya. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan Pemerintah Kolonial Belanda merupakan pemilik kewenangandari Kerajaan Belanda dalam melakukan pendudukan terhadap Indonesia yang memiliki perbedaan zaman, karakter dan cara pandang. Pada tulisan kali ini akan dibahas perbedaan karakteristik pembangunan permukiman kolonial Belanda pada masa VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda melalui metode konten analisis. Dari kajian yang dilakukan diketahui bahwasanya terdapat perbedaan pendekatan pembangunan permukiman kolonial Belanda berdasarkan visi dan misi penjajahan dari VOC atau Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Pada masa VOC, permukiman dibangun secara mandiri untuk memenuhi aspek keamanan dalam perdagangan, berbeda pada masa Pemerintah Kolonial Belanda yang mulai bekerjasama dengan swasta dan lebih memperhatikan aspek kesehatan dan kenyamanan selain keamanan guna melanggengkan usaha kolonialisasi disemua bidang dalam kehidupan. Selain itu didapatkan pula karakteristik umum yaitu terpisah dari permukiman etnis lain, memiliki teritori atau batas yang jelas, memiliki infrastruktur yang relatif lebih lengkap dan tertata jika dibandingkan dengan permukiman untuk etnis lain, serta berbentuk atau cenderung menggunakan pola grid untuk menata permukiman tersebut.

Kata kunci: Pembangunan Permukiman; Karakteristik Permukiman Kolonial; Kajian Literatur; VOC; Pemerintah Kolonial Belanda.

Abstract Cities in Indonesia that grew and developed during the Dutch occupation had a distinctive pattern of settlements that is the division of settlements based on ethnic classification. Dutch citizens and white people as first-class citizens get priority to enjoy the settlement area that is arranged and has a relatively complete infrastructure for its era. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) and the Dutch Colonial Government are the owners of the authority of the Kingdom of the Netherlands in occupying Indonesia which has different times, characters and perspectives. This article discusses the different characteristics of the construction of Dutch colonial settlements during the VOC and the Dutch Colonial Government through content analysis methods. From the study conducted it is known that there are differences in the approach of the construction of Dutch colonial settlements based on the vision and mission of the occupation of the VOC or the Dutch Colonial Government in Indonesia. During the VOC, settlements were built independently to meet security aspects in trade, in contrast to the Dutch Colonial Government who began working with the private sector and paid more attention to health and comfort aspects other than security in order to perpetuate colonial efforts in all areas of life. In addition, there are also general characteristics that are separate from other ethnic settlements, have clear territories or borders, have the relatively more complete infrastructure and are organized when compared to settlements for other ethnic groups, and are shaped or tend to use grid patterns to organize these settlements.

Keywords: Settlement Development; Characteristics of Colonial Settlements; Literature Review; VOC; Dutch Colonial Government

PENDAHULUAN

Kolonialisme Belanda merupakan salah satu babak sejarah penting yang mampu merubah wajah Indonesia secara keseluruhan. Dalam banyak aspek kehidupan, kolonialisme dianggap lebih banyak memberikan efek negatif daripada efek positif karena memunculkan banyak korban jiwa dan harta benda. Demikian pula pada bidang arsitektur khususnya permukiman. Permukiman kolonial Belanda di Indonesia terlihat berbeda dengan permukiman lokal, hal ini disinyalir karena permukiman kolonial Belanda lebih mendasarkan dirinya pada pertimbangan-pertimbangan logis dibandingkan dengan permukiman untuk masyarakat lokal yang relatif menonjolkan lebih banyak aspek budaya maupun kosmologi. Adapun beberapa pertimbangan logis yang dimaksud disini adalah kelengkapan infrastruktur, kesehatan lingkungan, serta aspek kenyamanan yang lebih terjamin. Hal tersebut terlihat dari kebijakan pemilihan lokasi untuk permukiman kolonial Belanda di Indonesia yang tidak berbaur dengan etnis lain. Dengan demikian maka kehadiran permukiman kolonial Belanda semakin memarginalkan permukiman tradisional yang telah ada sebelumnya, terlebih setelah diterapkannya beberapa kebijakan yang mengatur masalah tata wilayah seperti *wijkenstelsel* (permukiman berdasarkan etnis), *decentraliewet* (desentralisasi pemerintahan), *stadvormingordonantie* (pembangunan perkotaan), dan lain-lain.

Jawa pada masa kolonialisasi Belanda memegang peranan penting sebagai pusat dari pemerintahan maupun ekonomi. Oleh karenanya tidak heran jika pembangunan pada masa penjajahan Belanda banyak dilakukan di Jawa. Dalam bidang permukiman, migrasi penduduk Eropa ke Indonesia membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi kemajuan maupun pemekaran kota dengan dibukanya daerah-daerah baru untuk permukiman bagi orang-orang Eropa khususnya Belanda. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki melahirkan pendekatan efektif dan efisien yang salah satunya diwujudkan dalam pola kemitraan pemerintah dan swasta dalam rangka menyediakan permukiman dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cepat khususnya setelah diterapkannya Politik Etis dan *Decentraliewet*. Selain itu kebutuhan untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman melalui penyesuaian diri dengan iklim dan lingkungan setempat membawa pembaharuan pada wujud arsitektur permukiman Eropa yang dibawa masuk ke Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada kemunculan Arsitektur Indo Eropa atau yang sering disebut sebagai Arsitektur Indis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan membahas pola dan perkembangan pembangunan permukiman untuk orang-orang Eropa khususnya Belanda di Pulau Jawa secara komprehensif. Pulau Jawa digunakan sebagai studi kasus atas dasar pertimbangan bahwasanya Pulau Jawa menjadi pusat dari segala aktifitas dan pembangunan yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia. Dengan begitu maka persinggungan antara arsitektur lokal beserta konteks yang ada di dalamnya dengan arsitektur Eropa yang dibawa oleh Belanda akan sangat mungkin terjadi. Dari beberapa pertimbangan diatas maka diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ilmu pengetahuan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia melalui studi kasus Pulau Jawa dari sudut pandang permukiman.

Metodologi atau pendekatan penelitian yang digunakan kali ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis konten. Literatur yang digunakan pada penelitian ini adalah

literatur mengenai permukiman kolonial Belanda di Indonesia atau Pulau Jawa yang diterbitkan dalam bentuk buku berjangka waktu kurang lebih 10 tahun terakhir oleh peneliti-peneliti yang diakui kepakarannya dalam bidang arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Literatur yang dipilih pertama-tama akan dikategorisasikan berdasarkan ruang lingkup berlakunya teori yang tercantum pada literatur yakni apakah berlaku untuk keseluruhan Indonesia ataukah hanya di Pulau Jawa, serta periodisasi waktu.

Dari kategorisasi teori yang dilakukan, selanjutnya akan muncul sebuah hirarki teori secara vertikal (ruang lingkup) maupun horizontal (periodisasi waktu). Hirarki teori tersebut selanjutnya akan dikaji secara kritis untuk mengetahui bagaimanakah hubungan atau keterkaitan antar teori yang ada baik secara vertikal maupun horizontal serta konteks dan setting lingkungan yang menyertainya. Hasil akhir dan diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah narasi yang komprehensif, dimana kita dapat mengetahui bagaimanakah perkembangan arsitektur permukiman kolonial Belanda di Pulau Jawa beserta pola dan faktor-faktor yang mendasarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Arsitektur Kolonial di Indonesia: Sebuah Pengantar

Soekiman (2011) menjelaskan bahwasanya kehadiran orang-orang Eropa khususnya Belanda ke Indonesia yang semula hanya sekedar berdagang berubah menjadi ingin menguasai komoditas dagang dan hal ini kemudian memunculkan praktek kolonialisasi yang selanjutnya mempengaruhi kebudayaan asli hingga memunculkan kebudayaan baru yang belum pernah ada sebelumnya yaitu kebudayaan indis. Lebih lanjut Soekiman (2011) menjelaskan bahwasanya kebudayaan Indis tercermin pada berbagai macam elemen fisik maupun non fisik termasuk didalamnya adalah arsitektur.

Sejarah perkembangan Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia telah dimulai sejak VOC memulai aktivitas perdagangannya pada tahun 1602 dan dilanjutkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai dengan 1942. Selama praktek kolonialisasi Belanda di Indonesia, Arsitektur kolonial telah berkembang sedemikian rupa mengikuti perkembangan politik penjajahan dan kebudayaan yang diberlakukan oleh Belanda (Soekiman, 2011: 21-38). Senada dengan Soekiman, Silas (2005) berpendapat bahwa wujud arsitektur yang paling responsif terhadap perubahan adalah rumah tinggal, oleh karena itu maka dengan mengamati perkembangan arsitektur permukiman kolonial di Indonesia, kita bisa mengetahui bagaimana Arsitektur kolonial yang dibawa dari Eropa berkembang di Indonesia dengan pendekatan formal dan rasional sehingga menjadi arsitektur yang responsif terhadap keadaan lingkungannya.

Selanjutnya, Suptandar (2001), Silas (2005), De Vletter (2009), maupun Soekiman (2011) sepakat bahwasanya peran dari Arsitektur kolonial yang diterapkan di Indonesia khususnya Jawa adalah sebagai simbol kekuasaan dari kolonialisasi Belanda, dan secara perlahan namun menjadi simbol identitas yang diikuti oleh masyarakat lokal agar dapat dekat dengan penguasa, inilah cara bagaimana pendekatan arsitektur dan tata kota ala barat mempengaruhi arsitektur dan tata kota lokal.

B. Arsitektur Kolonial, Pembangunan, dan Modernisasi Arsitektur di Indonesia

Pada sub bab ini dan seterusnya akan diperbandingkan pendapat dan teori mengenai perkembangan umum arsitektur kolonial Belanda di Indonesia dari 6 buah artikel dalam buku atau

buku yang ditulis oleh 5 orang peneliti arsitektur yang berbeda. Selain itu juga akan dikaji artikel lain sebagai penunjang atau tambahan dari isi tulisan ini. Lebih detail mengenai judul artikel atau buku dan nama penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Tulisan Yang Digunakan Sebagai Rujukan Utama

No.	Nama Penulis	Tahun	Judul Artikel dalam Buku / Buku
1.	Johannes Widodo	2007	Arsitektur Indonesia Modern: Transplantasi, Adaptasi, Akomodasi, dan Hibridisasi
2.	Cor Passchier	2007	Arsitektur Kolonial di Indonesia Rujukan dan Perkembangan: Masa lalu Dalam Masa Kini Arsitektur Indonesia
3.	Handinoto	2010	Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa Pada Masa Kolonial
4.	Cor Passchier	2012	Mencari Arsitektur Indonesia yang Utama Pada Masa Akhir Kolonial: Tegang Bentang
5.	Amir Sidharta	2012	Ketengangan dan Perdebatan dalam Sejarah Arsitektur Modern Indonesia
6.	Emile Leushuis	2014	Panduan Jelajah Kota-Kota Pusaka di Indonesia

Sumber: Wihardyanto, 2019

Dari keenam tulisan yang dikaji, semua peneliti membagi periode perkembangan Arsitektur Kolonial di Indonesia berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan pembangunan di Pulau Jawa pada masa pendudukan Belanda di Indonesia. Pulau Jawa digunakan sebagai representasi dari Indonesia karena sebagian besar pembangunan maupun kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diterapkan oleh Belanda mengacu pada kondisi yang ada di Pulau Jawa. Hal ini mengakibatkan kondisi Pulau Jawa tampak berbeda dengan pulau lainnya di Indonesia dalam hal kemajuan pembangunan. Salah satu contohnya adalah sebagian besar jalur kereta api di Indonesia terdapat di Pulau Jawa yang awalnya dimaksudkan untuk memudahkan pengangkutan hasil bumi dari pedalaman menuju pelabuhan. Oleh karena itu maka dengan mengamati perkembangan Arsitektur Kolonial Belanda di Jawa diharapkan dapat mewakili sebagian besar dari perkembangan Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia.

Dari kajian literatur yang dilakukan, diketahui bahwasanya periode perkembangan Arsitektur Kolonial dapat dikategorikan menjadi 2 fase, fase pertama yang berlangsung antara tahun 1602 M s.d. 1799 M dan fase kedua berlangsung antara tahun 1800 M samap dengan 1942 M. Pembagian fase tersebut tampaknya didasarkan pada perbedaan orientasi maupun visi misi dari pendudukan Belanda di Indonesia khususnya Jawa. Pada fase pertama, semua peneliti sepakat bahwasanya Belanda belum melakukan pembangunan yang terencana di Indonesia karena VOC memfokuskan pada usaha monopoli perdagangan, sedangkan pada fase kedua Pemerintah Kolonial Belanda telah melakukan pembangunan yang terencana karena telah berorientasi kepada penguasaan wilayah beserta sumber dayanya (kolonialisasi).

Dikarenakan orientasi yang lebih difokuskan pada perdagangan maka wujud Arsitektur Eropa yang muncul di Indonesia pada masa VOC terbatas pada pos perdagangan berupa benteng, dan rumah-rumah merangkap gudang penyimpanan bergaya Klasik Eropa yang terdapat di daerah sekitar benteng. Wujud arsitektur tersebut berbeda dengan arsitektur lokal yang ada dan belum pernah dibangun di Indonesia sebelumnya. Oleh karena itu maka Widodo (2007), dan Sidharta (2012) menyebutkan modernisasi arsitektur di Indonesia dimulai pada masa ini (disebutkan sebagai Masa Modern Awal). Lebih lanjut Widodo (2007) menyatakan bahwasanya sebelum abad

ke-19 bangunan bergaya arsitektur Eropa masuk dan berkembang di Indonesia dengan cara transplantasi arsitektur yakni dengan menerapkan mentah-mentah arsitektur Eropa di Indonesia tanpa sebelumnya dikontekstualisasikan terlebih dahulu. Benteng maupun bangunan lain didirikan dengan cara meniru apa yg dibangun di Eropa atau Belanda tanpa adanya penyesuaian terlebih dahulu (Gambar 1). Berbeda dengan yang terjadi pada abad ke 19 dan setelahnya dimana penerapan Arsitektur Eropa di Indonesia telah terlebih dahulu mengalami proses pemikiran mendalam mengenai proses adaptasi, akomodasi, serta fusi. Hal senada ditambahkan oleh Sidharta (2012) yang menjelaskan bahwa pada abad ke 19 Arsitektur Eropa diterapkan di Indonesia melalui proses adaptasi dan akulturasi. Lebih lanjut Sidharta (2012) berpendapat bahwasanya dibidang permukiman, VOC tidak memiliki perencanaan pembangunan permukiman karena orientasi kegiatannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya dalam waktu cepat. Berbeda dengan masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang mulai merencanakan permukiman secara sistematis. Salah satu indikasinya adalah mulai adanya gambar-gambar rencana perluasan kota yang didalamnya terdapat rencana pengembangan kawasan permukiman kolonial.



Gambar 1. Benteng Batavia th. 1618 (kiri), Benteng Semarang tahun 1787 (kanan). Bentuk Benteng Serta Kanal Pendukungnya Mirip Dengan Benteng-Benteng dan Kanal yang Dibangun di Belanda atau Eropa pada Umumnya.
Sumber: <http://colonialarchitecture.eu>, diakses Agustus 2019

Berbeda dengan peneliti lain yaitu Handinoto (2010), Cor (2007), (Passchier 2007 dan 2012), serta Leushuis (2014) yang berpendapat bahwasanya modernisasi arsitektur di Indonesia belum terjadi pada masa VOC, melainkan baru terjadi pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal ini terlihat pada tidak adanya label modern yang diberikan pada kurun waktu tahun 1602 sampai dengan 1799 oleh para peneliti tersebut. Para peneliti tersebut menguraikan beberapa hal yang dapat dijadikan alasan mengapa modernisasi arsitektur baru terjadi pada saat Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, yang pertama adalah adanya pembangunan yang lebih tersistematis dan memiliki landasan. Kedua adalah adanya beberapa kebijakan sosial politik seperti misalnya Politik Liberalisasi, Politik Etis, serta Politik Desentralisasi yang selain mempercepat arus barang, jasa, dan manusia, juga mempercepat informasi masuk dari Eropa ke Indonesia sehingga muncul paradigma baru dalam pembangunan. Penulis berpendapat bahwasanya kemunculan gerakan modernisme di Eropa merupakan salah satu yang berpengaruh, dimana paradigma arsitektur yang lebih terukur mengikis romantisme arsitektur zaman klasik. Salah satunya dengan lebih mengedepankan aspek fungsi daripada dekorasi serta lebih mengeksplorasi penggunaan material dan teknologi fabrikasi.

Lebih lanjut, dengan memahami uraian dari Handinoto (2010), Passchier (2007 dan 2012), serta Leushuis (2014), penulis berpendapat bahwasanya peralihan kekuasaan dari VOC kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga membawa perubahan orientasi pembangunan yang ditandai dengan adanya usaha untuk membangun konektivitas darat antar wilayah di Indonesia alih-alih jalur laut. Hal tersebut dapat dilihat pada masa VOC daerah-daerah yang maju adalah daerah-daerah pesisir yang memiliki pelabuhan dan jalur perdagangan antar pulau untuk memfasilitasi memonopoli perdagangannya. Sebaliknya daerah pedalaman sebagai pusat produksi pertanian dan perkebunan kurang mendapatkan perhatian karena sulitnya akses. Artefak fisik yang dapat kita lihat adalah banyaknya benteng-benteng dibangun di tepi laut atau muara sungai sebagai pos perdagangan VOC. Berbeda dengan masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dimana konektivitas antara daerah pesisir dengan daerah pedalaman atau antar daerah pedalaman mulai ada dengan dibangunnya jalan pos besar (*De Grote Postweg*) Anyer - Panarukan, serta jalur kereta api. Dampak dari adanya jalur pos maupun jalur kereta api tersebut adalah mulai terbukanya daerah-daerah baru dipedalaman yang sebelumnya tidak tersentuh dan dengan terbukanya daerah baru ditambah arus barang, jasa, dan manusia yang semakin lancar maka pembangunanpun akan semakin merata dan kebutuhan akan permukiman semakin besar. Pernyataan tersebut didukung oleh Passchier (2007) bahwa fase modernisasi arsitektur di Indonesia dimulai dari penerapan beberapa kebijakan kolonialisasi seperti misalnya *cultuurstelsel* (tanam paksa), dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan itu maka diperlukan pembangunan infrastruktur jalan yang dimulai dari pembangunan *De Grote Postweg* dan dilanjutkan dengan pembangunan jalur kereta api.

Pembangunan di Indonesia dirasa semakin pesat setelah adanya pemberlakuan Politik Etis yang kemudian disusul oleh pemberlakuan *Agrarischewet* (Undang-Undang Liberalisasi Agraria), dan *Decentraliewet*. Penerapan politik, serta undang-undang tersebut berkorelasi terhadap meningkatnya jumlah industri baik industri sektor pertanian, perkebunan, maupun sektor-sektor lainnya (Soekiman, 2011). Dengan demikian maka terjadi pula lonjakan penduduk Eropa yang masuk ke Indonesia dalam rangka berinvestasi ataupun bekerja, dan hal ini menyebabkan lonjakan kebutuhan permukiman dalam skala besar. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam rangka penyediaan dan pembangunan permukiman adalah dengan diadakannya Kongres Perumahan Rakyat tahun 1922 yang terkenal dengan diskusi yang hangat antara Ir. Herman Thomas Karsten dan Ir. C.P. Wolff Schoemaker mengenai perbedaan peran pemerintah dalam penyediaan kebutuhan permukiman yang sehat bagi semua golongan Warga Hindia Belanda.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, didapatkan informasi bahwasanya kehadiran arsitektur kolonial Belanda di Indonesia sebagai momentum modernisasi arsitektur di Indonesia dapat ditinjau dari 2 sisi. Sisi yang pertama adalah arsitektur kolonial Belanda sebagai sebuah produk arsitektur yang wujudnya sama sekali berbeda dan sebelumnya belum pernah ada misalnya adalah benteng dari bahan batu atau batu bata seperti yang terdapat di Eropa. Sisi yang kedua adalah arsitektur kolonial Belanda ditinjau dari paradigma yang menghasilkan prinsip-prinsip arsitektur baru yang lebih modern tanpa mengesampingkan arsitektur yang sudah ada sebelumnya, misalnya adalah Arsitektur Indis pada bangunan rumah tinggal.

Penulis sendiri lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwasanya modernisasi arsitektur di Indonesia terjadi pada masa Pemerintah Kolonial Belanda berkuasa. Hal ini dikarenakan pada masa VOC, pembangunan arsitektur belum dilandasi oleh suatu pemikiran

komprehensif yang mempertimbangkan kebutuhan fungsi, struktur, konteks sosial, dan lingkungan serta tidak berlandaskan aturan tertentu.

C. Perkembangan Permukiman Kolonial di Indonesia Masa VOC

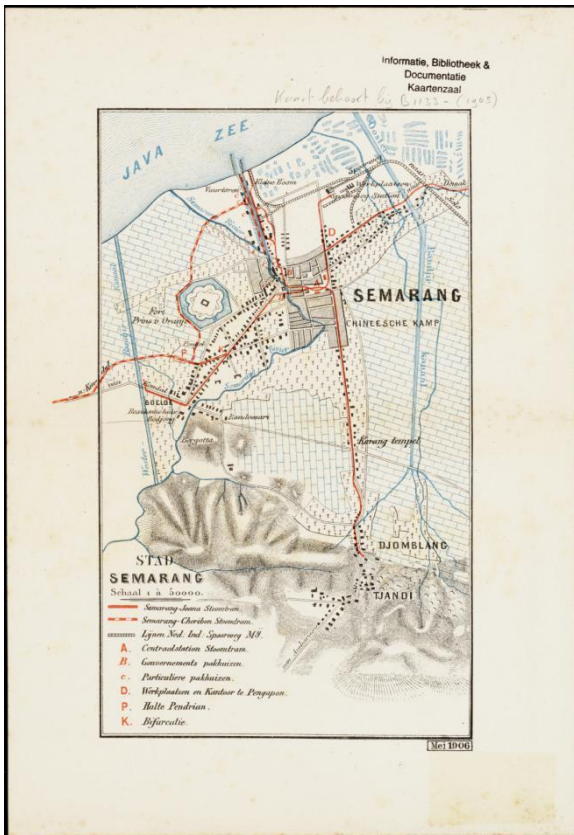
Pada masa VOC pembangunan dilakukan untuk menunjang perdagangan dan pengangkutan komoditas dari Indonesia menuju Belanda. Sidharta (2012) menjelaskan bahwasanya pada masa VOC, orang-orang Eropa khususnya Belanda umumnya tidak memiliki keinginan untuk menetap di Indonesia karena mereka umumnya adalah pedagang dan militer yang ditugaskan untuk memonopoli komoditas pertanian dan perkebunan untuk dibawa dan diperdagangkan di Eropa. Handinoto (2010) menambahkan bahwasanya guna mendukung usaha tersebut maka VOC membangun pos-pos perdagangan yang tidak jarang dilengkapi fasilitas keamanan berupa benteng di daerah pesisir dan membangun konektivitas melalui jalur laut diantara pos-pos perdagangan tersebut. Senada dengan Handinoto (2010), Leushuis (2014) menekankan bahwa benteng merupakan titik pertumbuhan arsitektur kolonial pada masa VOC. Jika perdagangan di daerah itu ramai atau strategis maka benteng juga akan semakin besar dan tidak jarang tumbuh pemukiman kolonial disekitarnya. Penjelasan tambahan mengenai hal ini dapat diketahui dari Buku *Fort in Indonesia* yang diterbitkan tahun 2012 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwasanya untuk menunjang kesuksesannya, VOC terlibat pada intrik politik atau suksesi kerajaan lokal dengan imbalan mendapatkan hak monopoli perdagangan dan tanah yang kelak berkembang sebagai daerah permukiman bagi orang-orang Eropa atau daerah pertanian dan perkebunan yang berstatus sebagai tanah partikelir.

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail, penulis merujuk pada pernyataan Passchier (2007) yang meskipun tidak secara tegas, membagi pembangunan pada masa VOC menjadi 2 periode yaitu periode Benteng (1600 s.d. 1750an) dan periode Di Luar Benteng (1750 - 1799). Pada periode benteng, keamanan komoditas dan kelancaran pengiriman menjadi hal yang utama, sehingga aspek sekuritas dan fungsionalitas perdagangan menjadi penting. Kenyamanan tinggal untuk orang-orang yang bekerja pada sektor perdagangan tidak dianggap prioritas karena seakan-akan mereka menilai dirinya hanya transit untuk mengambil barang dagangan. Oleh karena itu mereka merasa cukup untuk tinggal di dalam benteng tersebut. Hanya jika perdagangan semakin maju dan VOC memiliki kekuasaan lebih atas tanah pesisir maka mereka dapat membangun permukiman di luar benteng namun lokasinya tidak terlalu jauh atas pertimbangan keamanan.

Passchier (2007), Raap (2015), dan Handinoto (2010) memberikan penjelasan tambahan mengenai kawasan permukiman dan bentuk arsitekturnya. Mereka menjelaskan bahwasanya kawasan benteng dan permukiman orang-orang Belanda cukup jauh dari permukiman lokal yang umumnya di daerah pedalaman. Apalagi setelah terjadinya peristiwa pemberontakan Cina di Tangerang, kebijakan pemisahan permukiman Eropa dengan bangsa lain semakin diperketat dengan penerapan politik *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* yaitu penerapan kebijakan pelaporan dan biaya keluar masuk wilayah tertentu (Gambar 2). Ketiga penulis di atas juga menjelaskan bahwasanya bentuk rumah bergaya Eropa dua lantai yang efisien mirip dengan gaya arsitektur di kota-kota besar di Belanda juga ditemukan di kota-kota besar di Hindia Belanda lengkap dengan parit atau kanal-kanal yang selain berfungsi sebagai jalur transportasi juga berfungsi sebagai sanitasi dan keamanan.

Cor Passchier (2007) secara spesifik menyebutkan bahwasanya ruang-ruang atau bangunan di dalam benteng, termasuk di dalamnya untuk fungsi permukiman dibangun dengan pola grid untuk lebih memaksimalkan faktor keamanan karena pengawasan, dan mobilisasi tentara akan lebih mudah, hal ini seperti yang dianjurkan oleh penasihat militer Pangeran Oranye yaitu Simon Stevin (1548-1620). Lebih lanjut Passchier (2007) menjelaskan bahwa pola grid ini juga diterapkan untuk permukiman kolonial di sekitar benteng dengan maksud dan tujuan yang sama

serta mempermudah pembangunan kanal yang salah satu tujuannya adalah sebagai saluran air kotor.



Benteng Prins Van Oranje Semarang

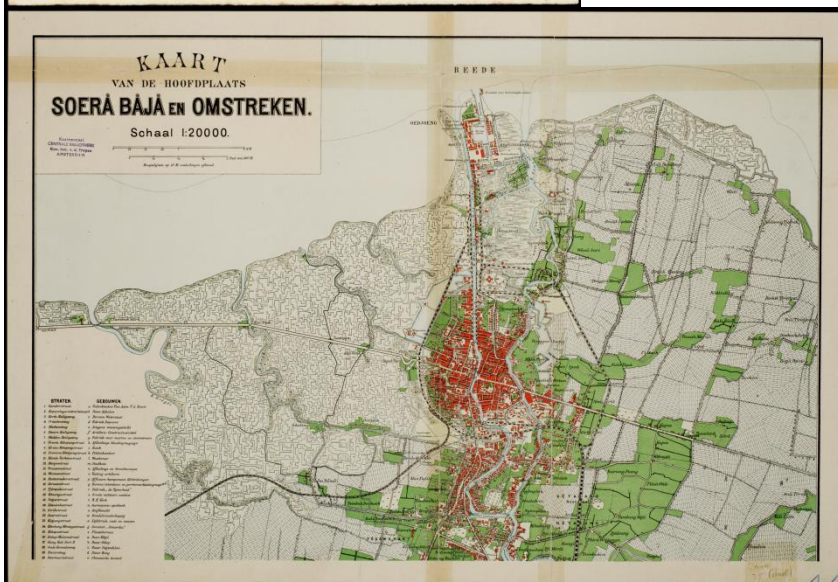
Permukiman Kolonial Belanda di Semarang.

Keberadaannya tidak jauh dari Benteng Prins Van Oranje di Semarang dan memanjang mengikuti jalur jalan utama di Semarang

Permukiman China (*Chineesche Kamp*)

Keterangan Tambahan :

Permukiman untuk orang-orang pribumi tidak digambarkan pada peta. Sejarah perkembangan Kota Semarang memang banyak diwarnai oleh aktifitas Belanda di daerah pelabuhan dan Semarang Utara. Sangat mungkin jauh dari kampung-kampung pribumi yang banyak terdapat di daerah pedalaman Semarang.



Benteng Surabaya

Permukiman Kolonial Belanda di Surabaya.

Keberadaannya tidak jauh dari Benteng Surabaya, di sepanjang jalan-jalan utama di Surabaya

Permukiman China (*Chineesche Kamp*)

Keterangan Tambahan :

Permukiman untuk pribumi digambarkan pada peta dengan blok berwarna hijau. Cenderung menyebar serta mengisi ruang-ruang kosong yang ada di pusat-pusat kota.

Gambar 2. Perkembangan Permukiman di Sekitar Benteng Semarang tahun 1904 (atas), Perkembangan Permukiman Kolonial di Sekitar Lokasi Benteng Surabaya tahun 1825 (bawah)

Sumber: <http://colonialarchitecture.eu>, diakses Agustus 2019

Sedikit berbeda dengan periode benteng, pada periode luar benteng, Passchier (2007) menjelaskan bahwa VOC mulai membuka akses secara terbatas ke daerah pedalaman. Disini mereka memanfaatkan tanah hadiah dari penguasa lokal sebagai tanah partikelir yang disewakan atau diperjualbelikan kepada pengusaha Belanda. Pada periode ini mulai tumbuh rumah-rumah

landhuis, yaitu rumah besar yang memiliki lahan yang sangat luas karena diperuntukkan juga bagi pertanian atau perkebunan beserta fasilitas pendukungnya seperti misalnya tempat tinggal untuk budak. Sebagai keterangan tambahan, Gill (1998) menggambarkan *landhuis* ini sebagai rumah berarsitektur campuran yang berukuran besar, berada ditengah-tengah perkebunan, memiliki akses jalan ke pelabuhan, serta jauh dari pemukiman lokal (Gambar 3).



Gambar 3. *Landhuis* Tjitrap Tahun 1930 (kiri), *Landhuis* Sinoman Semarang Tahun 1928 (kanan)
Sumber: <http://colonialarchitecture.eu>, diakses Agustus 2019

Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya sifat permukiman kolonial pada masa ini cenderung tertutup dan eksklusif. Mereka membangun dengan mentransplantasikan (mencangkokkan) gaya arsitektur Eropa, memosisikan permukimannya jauh dari permukiman lokal dan menyediakan segala sesuatunya khusus untuk kebutuhan mereka sendiri. Kesemuanya dikelola dalam pola permukiman berbentuk grid.

D. Perkembangan Permukiman Kolonial Di Indonesia Masa Pemerintah Kolonial Belanda

Perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda semakin pesat. Hal ini menurut Sidharta (2012) dilatarbelakangi oleh kebangkrutan VOC dan diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda, dengan demikian maka terjadi perubahan orientasi Belanda yang semula hanya berdagang menjadi menguasai sumber daya alam untuk jangka waktu yang panjang (kolonialisasi). Untuk menunjang kolonialisasi tersebut perlu disusun sistem pemerintahan dan ekonomi yang memerlukan rencana pembangunan yang sistematis, termasuk didalamnya adalah penyediaan permukiman kolonial beserta fasilitas pendukungnya.

Mulai adanya rencana pembangunan yang sistematis inilah yang dinyatakan oleh Passchier (2007) sebagai titik mula modernisasi pembangunan di Indonesia. Lebih lanjut Passchier (2007) maupun Handinoto (2010) menjelaskan bahwa untuk mengawalinya pemerintah kolonial Belanda terlebih dahulu meningkatkan keamanan sekaligus memeratakan arus barang, jasa, dan manusia di daerah dengan cara membangun infrastruktur jalan antar daerah khususnya di Pulau Jawa. Pembangunan *De Grote Postweg* dari Anyer hingga Panarukan tahun 1808 dapat dikatakan sebagai proyek yang strategis meskipun memakan korban jiwa yang banyak. Karena adanya jalan ini maka kota-kota pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa dapat terhubung dan menciptakan konektivitas yang cukup kuat dari sisi keamanan, dan ekonomi. Diduga adanya jalan raya pos ini menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Kolonial Belanda optimis menerapkan kebijakan *cultuurstelsel* pada tahun 1830 karena jalur pengangkutan menuju pelabuhan dan selanjutnya diangkut menuju ke negeri Belanda semakin mudah. Selain itu dengan adanya proyek ini, tumbuh pula beberapa kota baru sebagai penyokong kota pelabuhan yang sudah ada sebelumnya.

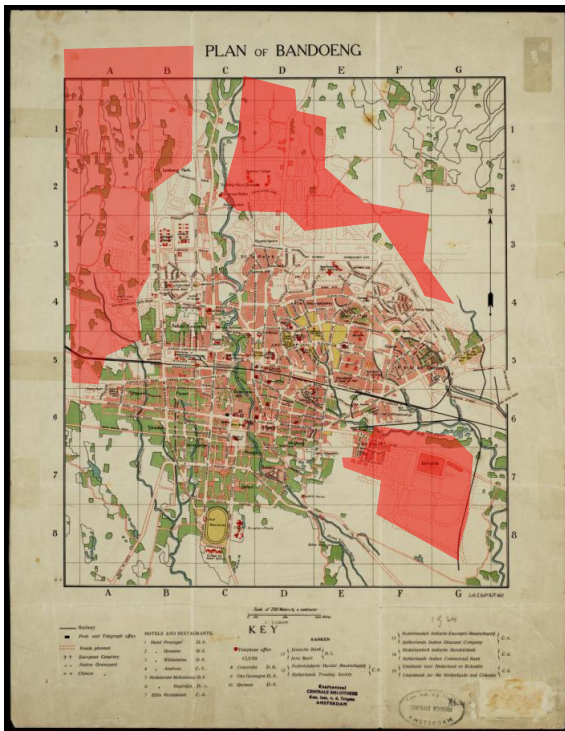
Selanjutnya untuk lebih memperluas dan memperkuat jaringan infrastruktur jalan yang sudah ada serta membuka daerah pedalaman sebagai pusat pertanian maupun perkebunan baru maka Pemerintah Kolonial Belanda mulai membangun jaringan jalan kereta api yang dimulai pada tahun 1873 dengan jalur Semarang-Tanggung. Tujuan utama dari adanya jalur-jalur kereta api ini

adalah untuk memudahkan jalur pengangkutan hasil bumi dari daerah pedalaman menuju stasiun pelabuhan untuk kemudian dikapalkan, namun demikian lambat laun dikembangkan pula untuk pengangkutan manusia karena tingginya permintaan. Keberhasilan dari pembangunan jalur kereta api tampaknya berkorelasi pada perkembangan ekonomi disuatu wilayah maupun kota di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, hal ini seperti yang diuraikan oleh Handinoto (2010) dan Leushuis (2014). Penulis berpendapat bahwasanya kehadiran kereta api di daerah pedalaman turut mendorong migrasi orang-orang Eropa menuju pedalaman untuk mengembangkan usahanya. Lama-kelamaan migrasi tersebut menyebabkan munculnya permukiman kolonial di daerah pedalaman. Handinoto (2010) memberikan penjelasan tambahan bahwasanya keberadaan jalur-jalur kereta api seringkali menjadi pertimbangan dalam perencanaan pengembangan kota ataupun permukiman kolonial.

Menjelang abad ke-20, Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan Politik Etis (1902) dan beberapa kebijakan yang nantinya akan mendorong pertumbuhan permukiman bagi masyarakat Eropa lebih pesat. Kebijakan tersebut adalah *agrarischewet* yang diterapkan tahun 1870-1942 dan *decentralisatiewet* yang diterapkan tahun 1903-1942. Handinoto (2010), Sidharta (2012), Passchier (2012), dan Leushuis (2014) sepakat menyatakan bahwa setelah penerapan Politik Etis sampai dengan tahun 1942 sebelum penjajahan Belanda digantikan oleh Jepang, pertumbuhan permukiman bagi orang-orang Eropa lebih pesat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pada periode ini jumlah kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dengan latar belakang mereka yang bermigrasi ke Indonesia pun semakin beragam. Hal ini mendorong pembaharuan di segala aspek kehidupan di Indonesia akibat masuknya paradigma baru ditengah-tengah paradigma yang sudah ada Surjomihardjo (2008).

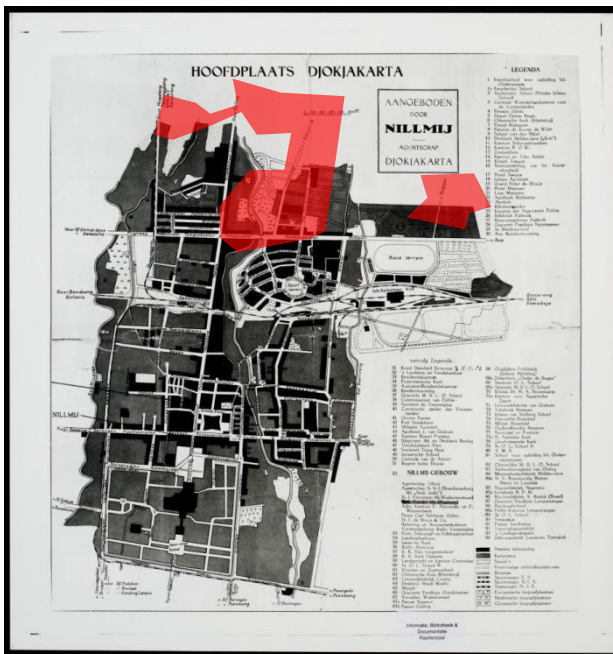
Migrasi yang cukup besar dari orang-orang Eropa selanjutnya mendorong Pemerintah Kolonial Belanda untuk memikirkan bagaimana menyediakan permukiman yang sehat dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu pemerintah mencoba merencanakan dan membangun kawasan permukiman kolonial baru di luar kota melalui suatu pola kemitraan publik-privat. Hal ini seperti yang diuraikan oleh Handinoto (2010), setelah tahun 1900-an Pemerintah Kolonial Belanda mulai melakukan perencanaan pengembangan kota di Indonesia secara menyeluruh terutama mengenai pembangunan kawasan hunian baru yang lebih baik dari segi kesehatan dan kesesuaian dengan iklim dan lingkungan setempat dengan mengadaptasikan prinsip-prinsip arsitektur lokal kedalam perancangannya. Leushuis (2014) menambahkan bahwasanya Pemerintah Kolonial Belanda banyak memanfaatkan tanah-tanah partikelir yang berada diluar kota sebagai kawasan permukiman kolonial baru yang lebih sehat (Gambar 4).

Dengan beberapa pernyataan di atas, maka penulis berpendapat bahwasanya perancangan permukiman kolonial baru ini lebih sehat karena mendapatkan kualitas lingkungan dan udara yang lebih baik, memiliki infrastruktur yang lebih lengkap karena direncanakan dan dibangun dengan perhitungan yang matang, serta lebih terjangkau karena memiliki harga tanah yang lebih murah dibandingkan di pusat kota. Tidak lupa prinsip *garden city* ala Ebenezer Howard yang saat itu tengah populer di Eropa dan Amerika bisa diterapkan karena ketersediaan lahan yang memungkinkan. Namun demikian, menurut Leushuis (2014) dan Passchier (2012), pola grid tampaknya tidak bisa ditinggalkan dalam pembangunan permukiman kolonial baru tersebut. Penulis menduga bahwasanya pola grid sangat efektif dan efisien untuk pembangunan infrastruktur penunjang permukiman.



Daerah pengembangan hunian baru. Pada peta ditandai dengan garis-garis putus yang menggambarkan rencana jalan dan blok hunian.

Gambar 4. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kolonial Bandung Th. 1927. Daerah Pengembangan Permukiman Baru Tampak Pada Blok Merah
Sumber: <http://colonialarchitecture.eu>, diakses Agustus 2019



Daerah pengembangan hunian baru. Pada peta ditandai dengan garis-garis putus yang menggambarkan rencana jalan dan blok hunian.

Gambar 5. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kolonial Yogyakarta Th. 1930. Daerah Pengembangan Permukiman Baru Tampak Pada Blok Merah
Sumber: <http://colonialarchitecture.eu>, diakses Agustus 2019



Daerah pengembangan hunian baru. Pada peta ditandai dengan garis-garis putus yang menggambarkan rencana jalan dan blok hunian.

Gambar 6. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kolonial Semarang Th. 1922 (bawah). Daerah Pengembangan Permukiman Baru Tampak Pada Blok Merah
Sumber: <http://colonialarchitecture.eu>, diakses Agustus 2019

Lebih lanjut Passchier (2012) menyatakan bahwasanya pemerintah menggandeng pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan permukiman setelah tahun 1900-an, terutama setelah pemberlakuan *decentraliewet*. Pemerintah pusat memposisikan diri sebagai regulator yang memiliki tugas untuk menyiapkan rencana pengembangan permukiman, dan mengatur regulasi pendukungnya, pemerintah daerah bertugas untuk serta menyiapkan lahan, serta membangun infrastruktur permukimannya, sedangkan pihak swasta berperan sebagai pengembang dan memasarkan. Oleh karena itu maka penulis berpendapat bahwa tidak heran jika kawasan maupun arsitektur permukiman kolonial ketika itu selain harus memenuhi kriteria sehat dan sesuai dengan

iklim setempat juga harus dibangun dengan gaya perancangan yang paling modern ketika itu agar mudah dijual (Gambar 5).

Sidharta (2012) mengingatkan bahwa adanya Kongres Perumahan Rakyat pada tahun 1922 tidak dapat dikesampingkan pada perkembangan pembangunan permukiman saat itu. Adapun tema diskusi pada kongres tersebut adalah penyediaan hunian yang sehat yang terjangkau. Dimulai dari pemilihan lahan yang tepat untuk permukiman, ketersediaan infrastruktur dasar penunjang permukiman yang cukup, serta arsitektur rumah tinggal yang sesuai terhadap iklim dan lingkungan lokal. Passchier (2012) menambahkan bahwa alih-alih menyediakan permukiman sehat untuk semua lapisan masyarakat di Hindia Belanda, Pemerintah Kolonial Belanda justru hanya berfokus pada sektor permukiman bagi masyarakat Eropa dengan mewujudkan kawasan permukiman yang eksklusif.



Gambar 7. Foto Rumah Tinggal di Bandung Timur Tahun 1920 (kiri), Rumah Tinggal di *Nieuw Menteng* Tahun 1930 (tengah), Rumah Tinggal di Tjandi Semarang Tahun 1930 (kanan).

Sumber: <http://colonialarchitecture.eu>, diakses Agustus 2019

Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah permukiman kolonial lebih terencana dibandingkan pada masa VOC dengan mempertimbangkan faktor infrastruktur permukiman, serta arsitektur yang lebih adaptif dengan kondisi iklim dan lingkungan lokal. Meskipun demikian permukiman kolonial tersebut masih mempertahankan pola grid dan bersifat eksklusif terpisah dari permukiman etnis lain.

E. Perkembangan Pembangunan Permukiman Kolonial di Indonesia dari Masa ke Masa

Dari ulasan sebelumnya dapat diketahui bahwasanya terdapat persamaan dan perbedaan dalam prinsip pembangunan permukiman kolonial di Indonesia pada masa VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda yang diakibatkan perbedaan orientasi serta visi misi dari dua lembaga tersebut. Perbedaan tersebut mampu mempengaruhi wujud dari arsitektur permukiman kolonial. Dari kajian teori diketahui bahwasanya orang-orang Belanda pada masa VOC belum ada keinginan untuk menetap dalam jangka waktu yang lama. Sehingga metode penerapan arsitektur Eropa di Indonesia pada masa VOC dinilai lebih mengedepankan keamanan dan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki melalui metode transplantasi tanpa memperhatikan kesesuaian terhadap iklim dan lingkungan setempat.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Dari kajian literatur diketahui bahwasanya keinginan untuk melakukan kolonisasi terhadap Indonesia mulai ada pada masa ini, dan hal ini berpengaruh pada keinginan untuk menetap dan membangun dalam jangka waktu yang lama. Metode penerapan arsitektur Eropa atau Belanda di Indonesia pada masa ini dinilai lebih memperhatikan kesesuaian terhadap iklim dan lingkungan setempat dengan lebih mengedepankan metode adaptasi demi mendapatkan kenyamanan selain keamanan.

Selanjutnya, dari kajian literatur kita dapat mengetahui bahwasanya permukiman kolonial di Indonesia dimulai dari permukiman di dalam benteng yang dibangun oleh VOC, permukiman tersebut dapat berkembang menjadi permukiman di daerah sekitar benteng jika perdagangan di suatu daerah dikatakan maju sehingga menarik banyak pedagang VOC untuk datang di daerah

tersebut. Sehingga menurut beberapa literatur lain, benteng sering disebut juga sebagai salah satu cikal bakal suatu kota kolonial. Lebih lanjut dari kajian literatur yang dilakukan, penulis menduga bahwasanya permukiman di dalam benteng tersebut sifatnya merupakan permukiman temporer yang didirikan dalam rangka menunjang fungsi perdagangan. Bentuk arsitektur permukimannya tidak khas karena hanya menyesuaikan wujud dari arsitektur benteng itu sendiri. Selanjutnya, karena daya tampung di dalam benteng dirasa tidak lagi memungkinkan, maka pedagang-pedagang Belanda bagian dari persekutuan dagang VOC yang datang belakangan sebagai akibat dari adanya monopoli perdagangan yang menguntungkan Belanda menggunakan lahan di sekitar benteng untuk membangun huniannya. Arsitektur yang berkembang untuk permukiman di sekitar benteng adalah relatif menyerupai arsitektur hunian yang ada di Belanda. Belum adanya keinginan untuk menetap dalam jangka waktu yang panjang tampaknya mempengaruhi keinginan Belanda untuk tidak mempelajari dan menggunakan arsitektur lokal yang relatif lebih sesuai untuk iklim dan lingkungan setempat. Selain tentunya alasan keterbatasan sumber daya.

Dari beberapa sumber kajian literatur diketahui pula bahwasanya diakhir masa VOC muncul suatu bentuk permukiman yang dibangun secara mandiri oleh orang-orang Belanda yang terletak di luar benteng. Permukiman tersebut dikenal dengan istilah *landhuis*, suatu bentuk permukiman yang terintegrasi dengan area pertanian atau perkebunan sebagai penyedia komoditas dagang. Dalam membangun *landhuis*, proses adaptasi terhadap iklim maupun lingkungan setempat mulai diterapkan dalam merancang rumah tinggal untuk orang-orang Eropa atau Belanda. Lebih lanjut, jika dilihat dari foto-foto yang ada, proses adaptasi tersebut dilakukan dengan cara meniru bentuk-bentuk arsitektur lokal yang sudah ada sebelumnya.

Masa Pemerintahan Kolonial Belanda merupakan era baru bagi pembangunan permukiman kolonial di Indonesia. Keinginan untuk menetap dan menguasai Indonesia memunculkan orientasi untuk membangun. Salah satu yang dikedepankan sebagai modal awal pembangunan adalah adanya jalur transportasi yang terencana untuk memperlancar arus barang, jasa, dan manusia. Oleh karena itu kemudian muncullah kebijakan untuk membangun jalan pos besar yang menghubungkan hampir seluruh kota di pantai utara Jawa dari Anyer sampai Panarukan, dan jalur transportasi kereta api yang menghubungkan daerah-daerah pesisir dengan daerah pedalaman di bagian tengah dan selatan Pulau Jawa. Selain itu, darianalisis yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwasanya pembangunan jalan raya pos dan jalur transportasi kereta api ada kaitannya pula dengan beberapa kebijakan politik yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda seperti memperlancar pelaksanaan dari *cultuurstelsel*, serta mendorong munculnya *agrarischewet*, dan *decentraliewet* karena dengan adanya jalur transportasi darat yang relatif komplis untuk masa itu maka daya dukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk daerah pesisir maupun pedalaman relatif sama sehingga menjadi daya tarik bagi investor. Dari kajian literatur diketahui pula bahwasanya pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, pembangunan permukiman kolonial mulai direncanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan perencanaan maupun rencana pengembangan kota. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembangunan pemukiman tidak didukung oleh kemampuan finansial Pemerintah Kolonial Belanda. Oleh karena itu maka dibentuklah sistem kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam hal pembangunan permukiman kolonial guna mewujudkan keinginan untuk membangun suatu kawasan khusus permukiman yang lebih baik dan terjangkau di luar kota dimaksudkan untuk merespon masalah kesehatan dan kesesuaian dengan iklim dan lingkungan setempat.

Untuk mempermudah memahami penjabaran mengenai perbandingan antara pembangunan permukiman kolonial Belanda pada masa VOC (1602 - 1799 M) dan Pemerintah Kolonial Belanda (1800 - 1942 M) penulis mencoba mengilustrasikannya pada Tabel. 2 seperti berikut :

Tabel 2. Komparasi Pembangunan Permukiman Masa VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda

	Masa VOC (1602 - 1799 M)	Masa Pemerintah Kolonial Belanda(1800 - 1942 M)
Tujuan Pembangunan	Fasilitas pendukung perdagangan	Bagian dari kolonialisasi
Lokasi Pembangunan	Daerah pesisir	Daerah pesisir dan daerah pedalaman
Perencanaan Pembangunan	Belum ada	Sudah Ada
Pendekatan Perancangan Permukiman	Transplantasi	Adaptasi / Akulturasi / Akomodasi / Fusi
Wujud Hunian	Permukiman di dalam benteng (dapat berupa ruang atau bangunan) Rumah terintegrasi dengan gudang di sekitar benteng Rumah terintegrasi dengan pertanian atau perkebunan	Kawasan rumah tinggal
Pemilik atau Penghuni	Terbatas pada militer dan pedagang	Masyarakat golongan kelas 1 (Eropa)
Orientasi Pembangunan Permukiman	Keamanan	Keamanan, Kesehatan, dan Kenyamanan
Pelaku Pembangunan Permukiman	Belanda (VOC) atau swasta	Kemitraan pemerintah kolonial Belanda dengan swasta

Sumber: Wihardyanto, 2019

Permukiman kolonial pada masa VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah permukiman kolonial dibangun di kawasan yang terpisah dari permukiman etnis lain dan memiliki teritori yang jelas. Hal ini selaras dengan Silas (2005) yang menyatakan bahwa permukiman pribumi atau yang akrab disebut sebagai kampung cenderung berkembang secara organik mengisi ruang-ruang kota tanpa batas-batas yang jelas. Yang kedua adalah permukiman untuk orang-orang Eropa atau Belanda dibangun dengan pendekatan logis formal, hal ini diindikasikan dengan bentuk permukiman yang cenderung grid dan fasilitas publik yang relatif lengkap pada masanya. Seperti yang dijelaskan oleh Soekiman (2011) bahwasanya warga kulit putih merupakan warga kelas pertama yang mendapatkan keutamaan dalam banya hal, salah satunya adalah fasilitas publik. Selain itu, dengan menggunakan pola grid maka pembangunan infrastruktur permukiman yang disediakan oleh pemerintah akan lebih efektif serta efisien.

KESIMPULAN

Dalam perjalanannya, pembangunan permukiman pada masa penjajahan Belanda di Indonesia memiliki dua buah pendekatan berbeda yang dapat dikategorisasikan berdasarkan pelaku. Pada masa VOC, belum terdapat perencanaan permukiman bagi orang-orang Eropa atau Belanda yang dikarenakan orientasi utama VOC adalah berdagang, sehingga melahirkan pandangan bahwasanya hunian adalah fasilitas pendukung yang sifatnya sementara. Permukiman dibangun di dalam atau disekitar benteng yang lebih mengutamakan keamanan, arsitektur hunian pun belum beradaptasi dengan kondisi iklim dan lokasi setempat serta cenderung mentransplantasikan bentuk arsitektur hunian yang ada di Belanda. Hal ini berbeda dengan masa Pemerintahan Kolonial Belanda, orientasi utama yang menitikberatkan pada penguasaan terhadap Indonesia melahirkan pandangan bahwasanya orang-orang Belanda akan tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama, maka diperlukan permukiman yang aman dan dapat beradaptasi dengan kondisi iklim dan lingkungan setempat agar tercipta rasa nyaman.

Terdapat beberapa karakteristik dari pembangunan perumahan bagi orang-orang Eropa atau Belanda di Indonesia. Yang pertama adalah permukiman dibangun terpisah dari permukiman

etnis lain, memiliki teritori atau batas yang jelas, memiliki infrastruktur yang relatif lebih lengkap dan tertata jika dibandingkan dengan permukiman untuk etnis lain, serta berbentuk atau cenderung menggunakan pola grid untuk menata permukiman tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Cor, Passchier. 2007. *Arsitektur Kolonial Di Indonesia Rujukan Dan Perkembangan.* " In Masa Lalu Dalam Masa Kini : *Arsitektur Indonesia.* Jakarta: Netherland Architecture Institute: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gill, Ronald. 1998. *Country Houses in the 18th Century.* " In *Indonesian Heritage Book 6 : Architecture.* Singapore: Archipelago Press.
- Handinoto. 2010. *Arsitektur Dan Kota-Kota Di Jawa Pada Masa Kolonial.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Leushuis, Emile. 2014. *Panduan Jelajah Kota-Kota Pusaka Di Indonesia.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nas, Peter, and Martien De Vletter. 2009. *Masa Lalu Dalam Masa Kini: Arsitektur Di Indonesia.* PT Gramedia Pustaka Utama.
- Passchier, Cor. 2012. *Mencari Arsitektur Indonesia Yang Utama Pada Masa Akhir Kolonial.* " In *Tegang Bentang Seratus Tahun Perspektif Arsitektural Di Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Raap, Olivier Johannes. 2015. *No Title. Kota Di Djawa Tempo Doeloe.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sidharta, Amir. 2012. *No Title. Ketengangan Dan Perdebatan Dalam Sejarah Arsitektur Modern Indonesia.* " In *Tegang Bentang Seratus Tahun Perspektif Arsitektural Di Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Silas, Johan. 2005. *No Title Perjalanan Panjang Perumahan Indonesia Dalam Dan Sekitar Abad XX.* " In *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota Di Indonesia.* Yogyakarta: NIOD Netherland – Penerbit Ombak.
- Soekiman, Djoko. 2011. *Kebudayaan Indis Dari Zaman Kompeni Sampai Revolusi.* Jakarta: Komunitas Bambu.
- Suptandar, Pamuji. 2001. *Arsitektur Indisch Tinggal Kenangan.* Harian Kompas.
- Surjomihardjo, Abdurrahman. 2008. *Sejarah Perkembangan Kota Yogyakarta 1880-1930.* Jakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Widodo, Johannes. 2007. *Arsitektur Indonesia Modern : Transplantasi, Adaptasi, Akomodasi, Dan Hibridisasi.* " In *Masa Lalu Dalam Masa Kini : Arsitektur Di Indonesia.* Jakarta: Netherland Architecture Institute – PT. Gramedia Pustaka Utama.